



Pusat Analisis Keparlemenan  
Badan Keahlian Setjen DPR RI

## MENINGKATKAN PERTUMBUHAN INDUSTRI MANUFAKTUR INDONESIA MELALUI KEBIJAKAN IMPOR YANG EFEKTIF

**Juli Panglima Saragih**  
Analisis Legislatif Ahli Madya  
[juli.saragih@dpr.go.id](mailto:juli.saragih@dpr.go.id)

**Audry Amaradyaputri Suryawan**  
Analisis Legislatif Ahli Pertama  
[audry.suryawan@dpr.go.id](mailto:audry.suryawan@dpr.go.id)

### Isu dan Permasalahan

Industri Manufaktur Indonesia selama 34 bulan terakhir berada dalam zona ekspansif, namun terdapat tanda-tanda perlambatan ekspansi usaha yang disebabkan pelemahan permintaan. Data terbaru menunjukkan *Purchasing Managers' Index* (PMI) pada Juni 2024 berada di angka 50,7, lebih rendah dibandingkan Mei 2024 yang mencapai 52,1. Perlambatan terjadi selama tiga bulan berturut-turut dan menempatkan skor Juni 2024 menjadi yang terendah sejak Mei 2023. Hal tersebut turut dipengaruhi oleh depresiasi rupiah, suku bunga tinggi, dan pelemahan pasar.

Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (Celios), Bhima Yudhistira, berpendapat gencarnya barang impor yang masuk memicu penurunan daya saing produk industri lokal. Apabila kinerja industri manufaktur tidak segera diperbaiki dan tren pelemahan PMI manufaktur terus berlanjut maka efisiensi perusahaan industri akan terus menurun, fasilitas pembiayaan kredit usaha akan terhambat, dan pertumbuhan ekonomi akan melemah. Hal ini tentu akan berpengaruh terhadap perekonomian nasional karena kontribusi sektor industri terhadap produk domestik bruto (PDB) cukup besar, mencapai sekitar 18%.

Juru Bicara Kementerian Perindustrian, Febri Hendri Antoni Arif, menjelaskan bahwa Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) No. 8 Tahun 2024 tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor, yang merelaksasi impor barang-barang dari luar negeri sejenis dengan produk yang diproduksi di dalam negeri, telah menyebabkan penurunan optimisme pelaku industri dan berdampak pada penurunan PMI. Oleh karena itu, diperlukan sejumlah penyesuaian kebijakan, seperti pengembalian aturan Permendag No. 36 Tahun 2023 serta penerapan restriksi perdagangan melalui hambatan tarif berupa Bea Masuk Tindakan Pengamanan (BMTP) dan Bea Masuk Anti Dumping (BMAD) dengan tarif maksimal untuk beberapa komoditas, termasuk Tekstil dan Produk Tekstil (TPT) serta keramik. Namun, penerapan rencana kebijakan tersebut khususnya terkait tarif bea masuk perlu dilakukan dengan hati-hati untuk menghindari dampak negatif yang tidak diinginkan.

Ketua Umum Himpunan Peritel dan Penyewa Pusat Perbelanjaan Indonesia (Hippindo), Budihardjo Iduansjah, khawatir bahwa pengenaan bea masuk yang tinggi pada impor TPT dapat memicu Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) di industri ritel. Pengenaan bea masuk hingga 200% pada semua kategori impor TPT dapat berdampak buruk pada kinerja ritel di pusat perbelanjaan. Menurutnya, lebih bijak untuk mengenakan BMTP dan BMAD yang lebih tinggi pada produk TPT impor yang murah, karena menaikkan bea masuk untuk barang-barang mahal justru dapat mengurangi daya saing gerai ritel dan menurunkan daya tarik wisatawan asing untuk berbelanja di Indonesia.

Wakil Ketua Umum Bidang Perdagangan Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia, Juan Permata Adoe, menekankan agar rencana restriksi impor tidak menyulitkan dunia usaha dan

industri dalam negeri untuk mendapatkan bahan baku maupun bahan penolong. Menurutnya, iklim usaha dan investasi harus tetap terjaga dengan baik demi menciptakan industri yang lebih berdaya saing. Oleh karena itu, Kadin mendesak agar pemerintah melakukan peninjauan mendalam terhadap *Harmonized Commodity Description and Coding System* atau barang impor yang akan terdampak oleh wacana bea masuk. Agar penerapan bea masuk tersebut tepat sasaran dan dampak negatif terhadap produktivitas industri dapat dihindari maka rencana restriksi tersebut tidak mencakup produk yang belum dapat diproduksi dalam negeri serta produk dengan spesifikasi yang berbeda.

Yose Rizal Damuri, Direktur Eksekutif Center for Strategic and International Studies (CSIS), menyatakan pengenaan BMTD dan BMAD yang terlalu tinggi terhadap produk impor juga berisiko memicu aksi *retaliasi* dari negara asal, karena terdapat kemungkinan negara asal akan berbalik menerapkan bea masuk yang tinggi terhadap produk ekspor Indonesia. Sementara itu, Direktur Eksekutif Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia, Mohammad Faisal, menyatakan bahwa penerapan BMTD dan BMAD dapat efektif dilakukan dengan memperhatikan dua aspek. *Pertama*, memastikan bahwa produk yang dikenakan tarif bea masuk adalah produk yang memang sudah banjir di pasar domestik. *Kedua*, jika mekanisme bea masuk tersebut sudah dirumuskan dengan benar dan detail maka pemerintah harus segera menerapkannya dengan cepat karena beberapa industri kini berada di tahap krisis dengan banyak pabrik yang sudah tutup dan banyaknya PHK.

## Atensi DPR

Penurunan PMI industri manufaktur Indonesia dan pelemahan sektor industri dalam negeri memerlukan perhatian khusus dari Komisi VII DPR RI yang membidangi energi, riset dan inovasi, serta industri. Ketergantungan pada impor produk jadi dapat menurunkan daya saing produk lokal. Komisi VII DPR RI perlu memantau kebijakan perdagangan dan mendesak Kementerian Perindustrian untuk meninjau *Harmonized Commodity Description And Coding System* atau barang impor yang akan terdampak oleh wacana bea masuk. Penerapan BMTD dan BMAD harus dilakukan dengan bijaksana agar kebijakan yang diterapkan tepat sasaran dan tidak berdampak negatif pada pertumbuhan industri nasional. Komisi VII DPR RI juga perlu memfasilitasi dialog antara pemerintah dengan pelaku industri guna mencari solusi inovatif menghadapi tantangan ekonomi global dan domestik, menjaga iklim usaha dan investasi tetap kondusif, serta meningkatkan daya saing industri manufaktur Indonesia di pasar internasional.

## Sumber

*Bisnis Indonesia*, 2 Juli 2024; dan ekonomi.bisnis.com, 30 Juni serta 1, 2, dan 3 Juli 2024.



Koordinator Sali Susiana  
Polhukam Puteri Hikmawati  
Ekkuinbang Sony Hendra P.  
Kesra Hartini Retnaningsih

<https://pusaka.dpr.go.id>

@pusaka\_bkdprri

### Polhukam

Prayudi  
Novianto M. Hantoro  
Ahmad Budiman

### Ekkuinbang

Sri Nurhayati Q.  
Sulasi Rongiyati  
Suhartono  
Venti Eka Satya  
Dewi Wuryandani

### Kesra

Yulia Indahri  
Trias Palupi K.  
Luthvi Febryka Nola

## EDITOR

## LAYOUTER

Dewi Sendhikasari D.  
Sita Hidriyah  
Noverdi Puja S.

Anih S. Suryani  
Teddy Prasetiawan  
T. Ade Surya  
Masyithah Aulia A.  
Yosephus Mainake

Mohammad Teja  
Nur Sholikhah P.S.  
Fieka Nurul A.

©PusakaBK2024